

## **EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM K3 DI KELURAHAN DUREN JAYA BEKASI TIMUR**

**Oleh : Elvira Suryani**

### **Abstract**

*Headman leadership involvement to influence the community is needed in order to participate in the implementation of K3 program. Effectiveness of the program can be seen from the high and low levels of leadership and influence public participation in the implementation of the K3 program.*

**Keywords: Leadership, Community participation, the effectiveness of the program**

### **PENDAHULUAN**

Kepadatan penduduk dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa persoalan kebersihan, keindahan, dan ketertiban perlu menjadi perhatian utama, mulai dari tingkat provinsi Jawa Barat, sampai ke Kota/Kabupaten, dan diteruskan dalam pemerintahan terkecil Kelurahan. Dalam pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan Kebersihan, Ketertiban, dan Keindahan (K3), Pemerintah Kota Bekasi telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2011 yang menjelaskan tentang Ketentuan Umum Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3). Peraturan ini juga merujuk kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Tata Ruang, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah Tahun 1999 tentang pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1998 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan peraturan pemerintah lainnya yang terkait dengan Kebijakan K3 (Kebersihan, Ketertiban, dan Keindahan). Dimana hal ini bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang berkeadilan berdasarkan pengembangan kehidupan sosial budaya, melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam menjunjung tinggi ketertiban, kebersihan, dan keindahan kota (Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2011: huruf a). Peraturan Daerah ini mulai dari tingkat Kota Bekasi, sampai kepada Kecamatan, Kelurahan, bahkan RW dan RT sebagai pelaksana teknis pemerintahan terkecil.

Kebersihan, keindahan, dan ketertiban adalah impian banyak pihak. Untuk itu diperlukan arahan dari pemimpin yang dapat menjadi daya dorong bagi masyarakat agar berpartisipasi dalam menjalankan program ini. Kemudian untuk mewujudkan kegiatan atau program ini diperlukan keterampilan khusus dari seorang pemimpin dalam mensosialisasikan program-program kegiatannya. Diperlukan keahlian dalam berkomunikasi, dan menarik simpati masyarakat dan bawahannya agar apa yang menjadi cita-cita seorang pemimpin dapat terwujud.

Oleh sebab itu, kepemimpinan seseorang sangat menentukan ruang gerak organisasi, baik organisasi pemerintahan maupun organisasi swasta. Hingga saat ini kepemimpinan menjadi topik yang unik untuk menjadi bahan kajian peneliti. Khususnya berkaitan dengan manusia yang setiap waktu mengalami perkembangan. Pemimpin juga faktor penentu dalam sukses atau gagalnya suatu organisasi dan usaha. Kualitas pemimpinlah yang menentukan keberhasilan lembaga atau organisasinya.

### **Kepemimpinan**

Kepemimpinan berasal dari kata pemimpin, yang artinya orang yang mampu memberikan pengaruh terhadap orang-orang di sekeliling agar mau bertindak sesuai dengan keinginannya. Pemimpin merupakan penentu dalam keberhasilan sebuah organisasi atau institusi. Kepemimpinan merupakan penggerak organisasi, bagaimana masyarakat dapat melakukan sesuatu sesuai dengan komando seorang pemimpin untuk mencapai tujuan bersama.

Veithzal Rivai, dalam bukunya *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi* (2004;2) menjelaskan kepemimpinan secara luas meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya.

Sedangkan Kartono (2005:51) menyatakan pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki superioritas tertentu, sehingga dia memiliki kewenangan dan kekuasaan untuk menggerakkan orang lain melakukan usaha bersama guna mencapai sasaran tertentu.

Sudriamunawar (2006:1) lebih menfokuskan definisi pemimpin berdasarkan seseorang yang memiliki kecakapan tertentu yang dapat mempengaruhi para pengikutnya untuk melakukan kerjasama ke arah pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pemahaman tentang esensialia kepemimpinan semakin diperkaya lagi oleh pengalaman banyak orang dalam perjalanan hidupnya diberi atau memperoleh kesempatan untuk menduduki jabatan-jabatan pimpinan, baik tingkat rendah, tingkat menengah, maupun tingkat puncak.

Anggapan ini sejalan dengan pendapat Raven Wirjana (2006:4) yang mengatakan bahwa pemimpin adalah seseorang yang menduduki suatu posisi dikelompoknya untuk mempengaruhi orang-orang dalam kelompok itu sesuai dengan ekspektasi peran dari posisi tersebut dan mengkoordinasikan serta mengarahkan kelompok untuk mempertahankan diri serta mencapai tujuannya.

Dari pengalaman teoritikal dan empiris, telah memberikan keyakinan banyak orang bahwa pemimpin adalah bicara pengaruh, seni menggerakkan orang-orang, pengetahuan mengambil tindakan, keahlian dalam memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh orang-orang yang dipimpinnnya. Pemimpin sangat diperlukan dalam sebuah organisasi untuk menentukan keberhasilan-keberhasilan program yang dibuatnya.

Sondang P. Siagian menjelaskan bahwa mutu kepemimpinan dalam berbagai organisasi dapat terlihat antara lain dalam kemampuan para pejabat pimpinan dalam organisasi untuk memahami sepenuhnya berbagai faktor yang merupakan kekuatan bagi organisasi, mengenali secara tepat berbagai bentuk kelemahan terdapat dalam organisasi, memanfaatkan berbagai peluang yang

mungkin timbul, menghilangkan berbagai bentuk ancaman yang dapat menjadi penghalang bagi keberhasilan organisasi mencapai tujuan dan berbagai sasarannya, memiliki sifat yang proaktif dan antisipatis terhadap perubahan yang pasti selalu terjadi, baik karena faktor-faktor interen maupun karena tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mendorong para bawahan sehingga bekerja dengan tingkat efisiensi, efektif, dan menciptakan cara dan iklim yang mendukung wawasan kebersamaan dalam usaha pencapaian tujuan.

Dalam paradigma pemerintahan, Kepala Daerah atau seringkali kita sebut juga sebagai pemimpin, merupakan pucuk piramida hierarki administrasi. Ia berperan dalam menjalankan aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintahan daerah yang lebih tinggi atau badan perwakilan daerah. Kepala Daerah memiliki hak dan kewajiban untuk membuat keputusan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan unit pemerintahan, Gubernur, Bupati, dan Walikota, hierarki kepemimpinan pemerintahan di Indonesia dimana posisi kepemimpinannya berada ditingkat menengah (*Middle Management*). Puncak kepemimpinan dijalankan oleh Presiden beserta pembantunya, dan dibawahnya terdapat kepemimpinan yang dijalankan oleh Camat dan Kepala Desa/Lurah.

Dr. J. Kaloh (2003: 24) mengemukakan bahwa salah satu karakteristik pemimpin pemerintahan, khususnya Kepala Daerah adalah tanggap terhadap kondisi politik, baik dalam organisasi pemerintahan maupun dalam masyarakat, serta memberikan jawaban atau tanggapan atas kritik, saran, dan mungkin juga pengawasan yang datang dari masyarakat, serta tanggap terhadap harapan dan kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu, pemimpin organisasi lainnya juga memiliki

persoalan yang sama pada berbagai keadaan dan tantangan dalam memimpin organisasi administrasi daerah.

Dengan menyadari kenyataan tersebut, Kepala Daerah sebagai pemimpin organisasi administrasi pemerintahan daerah dituntut untuk bersikap proaktif dengan mengandalkan kepemimpinan yang berkualitas untuk membangkitkan semangat kerja dari para bawahannya, maupun menggerakkan masyarakat untuk berperan aktif dan berpartisipasi dalam pembangunan serta mampu menjadi *creator*, *innovator*, dan *fasilitator* dalam rangka efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah.

Untuk mewujudkan keberhasilan tersebut, Kepala Daerah memerlukan kemampuan menggerakkan dan mengarahkan setiap anggota masyarakat dan seluruh aparatur pemerintahan untuk meraih keberhasilan tersebut. Cara menggerakkan dan mengarahkan setiap anggota masyarakat dan aparatur pemerintahan, seorang pemimpin juga dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan yang digunakannya. Sedangkan gaya kepemimpinan itu sendiri pengaruh dari perilaku seorang pemimpin.

Menurut Rivai (2004:58) gaya kepemimpinan memiliki tiga pola dasar yakni; (a) Gaya kepemimpinan yang berpola pada kepentingan pelaksanaan tugas, (b) Gaya kepemimpinan yang berpola pada pelaksanaan hubungan kerjasama, (c) Gaya kepemimpinan yang berpola pada kepentingan hasil yang dicapai

Dari ketiga pola dasar ini, Rivai (2004:58) terbentuk perilaku kepemimpinan yang berwujud kepada tiga tipe pokok kepemimpinan yaitu (a) tipe kepemimpinan

otoriter: tipe kepemimpinan ini menekankan kekuasaan di satu orang. Pemimpin bertindak sebagai penguasa tunggal. Kedudukan dan tugas anak buah semata-mata hanya sebagai pelaksana keputusan, perintah, dan bahkan kehendak pimpinan. Pimpinan memandang dirinya lebih dalam segala hal. Kemampuan bawahan selalu dipandang rendah, sehingga dianggap tidak dapat berbuat sesuatu tanpa diperintah, (b) tipe kendali bebas (*Laisser Faire*): Tipe kepemimpinan ini kebalikan dari tipe kepemimpinan otoriter. Pemimpin berkedudukan sebagai *symbol*. Kepemimpinan dijalankan dengan memberikan kebebasan penuh pada orang yang dipimpin dalam mengambil keputusan dan melakukan kegiatan menurut kehendak dan kepentingan masing-masing, baik secara perorangan maupun kelompok-kelompok kecil. Pemimpin hanya memfungsikan dirinya sebagai penasehat, (c) tipe kepemimpinan demokratis: Tipe kepemimpinan ini menempatkan manusia sebagai faktor utama dan terpenting dalam setiap kelompok atau organisasi. Pemimpin memandang dan menempatkan orang-orang yang dipimpinnya sebagai subjek yang memiliki kepribadian dengan berbagai aspeknya, seperti dirinya juga. Kemauan, kehendak, kemampuan, buah pikiran, pendapat, kreativitas, inisiatif yang berbeda-beda dihargai, dan disalurkan secara wajar. Tipe pemimpin ini selalu berusaha memanfaatkan setiap orang yang dipimpin. Kepemimpinan demokratis adalah kepemimpinan yang aktif, dinamis, dan terarah. Kepemimpinan ini dalam mengambil keputusan sangat mementingkan musyawarah yang diwujudkan pada setiap jenjang dan didalam unit masing-masing.

Kepemimpinan yang baik, selalu mempertimbangkan berbagai kebijakan-kebijakan yang dapat memberikan dampak pada masyarakat sebagai objek yang dilayani. Tugas utama pemerintah adalah sebagai abdi atau pelayan masyarakat. Kepuasan masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan dari organisasi pemerintahan yang di pimpinannya. Sehingga terciptalah laju organisasi dengan baik. Karena telah menghasilkan kepuasan terhadap masyarakat yang dipimpinnya.

Kepuasan ini menghasikan partisipasi masyarakat untuk terus mendukung program-program yang dicanangkan oleh pemerintah. Karena mereka menyadari dan memahami bahwa program-program tersebut ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri.

Tjokroamidjojo (1995:206) menyatakan partisipasi masyarakat keberhasilan pencapaian tujuan-tujuan pembangunan yang memerlukan keterlibatan aktif dari masyarakat pada umumnya, tidak saja dari pengambilan kebijaksanaan tinggi, para perencana aparatur pelaksana operasional, tetapi juga dari petani-petani, nelayan, buruh, pedagang kecil, para pengusaha dan lain-lain sebagainya.

Dari pendapat Tjokroamidjojo di atas kita dapat melihat bahwa partisipasi masyarakat tidak melihat lintas suku, budaya, pekerjaan, maupun jabatan. Namun partisipasi lahir dari sebuah kebutuhan manusia akan sesuatu. Karena Setiap masyarakat apapun latar belakangnya memiliki hak yang sama ikut serta dalam pembangunan sebagaimana yang digagas dalam UUD 1945 pasal 30, ayat 1.

Tjokrowinoto (1987), diacu dalam Hasibuan (2003), menyatakan alasan pembenaran partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yaitu (1) rakyat adalah fokus sentral dan tujuan akhir pembangunan, partisipasi merupakan



akibat logis dari dalil tersebut, (2) partisipasi menimbulkan harga diri dan kemampuan pribadi untuk turut serta dalam keputusan penting yang menyangkut masyarakat, (3) partisipasi menciptakan suatu lingkungan umpan balik arus informasi tentang sikap, aspirasi, kebutuhan, dan kondisi lokal yang tanpa keberadaannya akan tidak terungkap. Arus informasi ini tidak dapat dihindari untuk berhasilnya pembangunan, (4) pembangunan dilaksanakan lebih baik dengan dimulai dari dimana rakyat berada dan dari apa yang mereka miliki, (5) partisipasi memperluas wawasan penerima proyek pembangunan, (6) partisipasi akan memperluas jangkauan pelayanan pemerintah kepada seluruh lapisan masyarakat, (7) partisipasi menopang pembangunan, (8) partisipasi menyediakan lingkungan yang kondusif baik bagi aktualisasi potensi manusia maupun pertumbuhan manusia, (9) partisipasi merupakan lingkungan yang kondusif baik bagi aktualisasi potensi manusia maupun pertumbuhan manusia, (10) partisipasi merupakan cara yang efektif membangun kemampuan masyarakat untuk pengelolaan program pembangunan guna memenuhi kebutuhan lokal, (11) partisipasi dipandang sebagai pencerminan hak-hak demokratis individu untuk dilibatkan dalam pembangunan mereka sendiri.

Tipologi partisipasi menggambarkan derajat keterlibatan masyarakat dalam proses partisipasi yang didasarkan pada seberapa besar kekuasaan (*power*) yang dimiliki masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Kegunaan dari adanya tipologi partisipasi ini adalah: (a) untuk membantu memahami praktek dari proses pelibatan masyarakat, (b) untuk mengetahui sampai sejauh mana upaya peningkatan partisipasi masyarakat dan (c) untuk menilai dan mengevaluasi keberhasilan kinerja dari pihak-pihak yang melakukan pelibatan masyarakat.

Tingkat partisipasi masyarakat berbeda-beda, hal ini dibuktikan dari berbagai pengalaman empiris yang mengatakan bahwa latar belakang partisipasi masyarakat sangat erat kaitannya dengan karakteristik individu seseorang. Seperti yang diungkapkan oleh Madrie (1986:123), bahwa tingkat pendidikan, umur, kekosmopolitan, kesesuaian kegiatan dengan kebutuhan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi seseorang dalam melakukan kegiatan. Secara umum dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah keterlibatan masyarakat baik secara langsung atau tidak langsung, baik bersifat sumbangan tenaga, pikiran, harta benda yang mereka miliki yang nantinya hasilnya akan mereka nikmati sendiri. Sumaryadi (2010:46) menguraikan partisipasi sebagai peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan. Fasli Djalal dan Dedi Supriadi, (2001: 201-202) partisipasi juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya. Jadi partisipasi masyarakat dapat menentukan efektif tidaknya sebuah organisasi dalam menjalankan programnya. Efektivitas saling berdampingan dengan partisipasi. Oleh sebab itu efektivitas organisasi diperlukan dalam melihat berhasil atau tidaknya seorang pemimpin dalam menjalankan organisasi yang dikelolanya. Organisasi merupakan wadah bagi seorang pemimpin

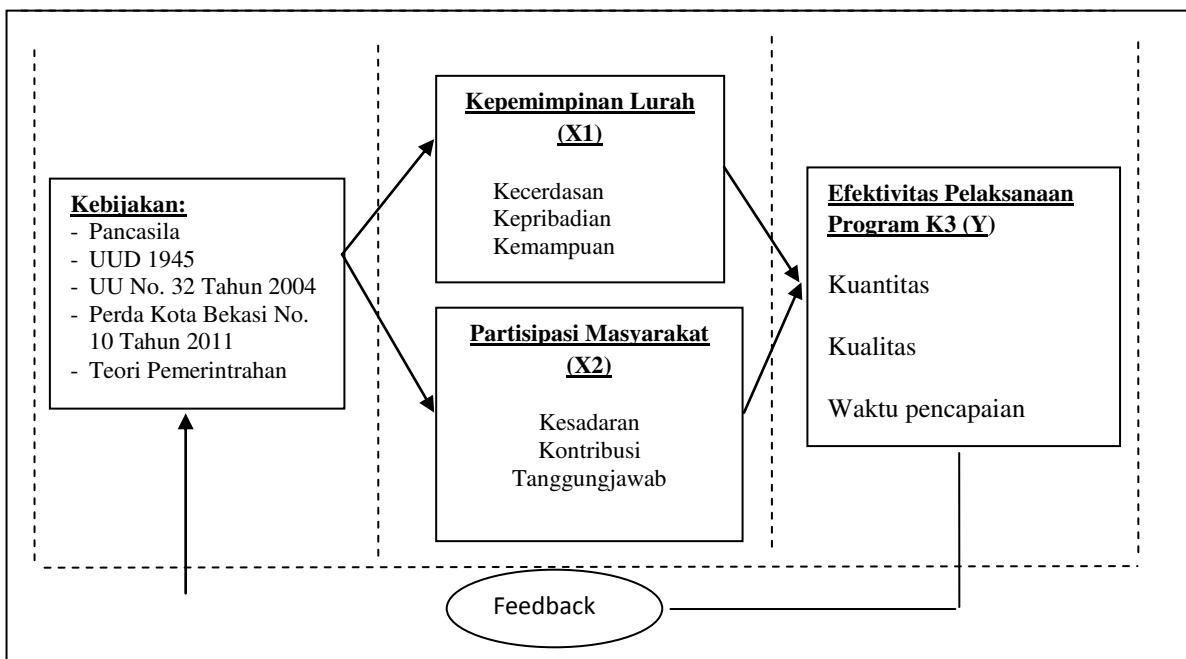
untuk melaksanakan berbagai macam kebijakan-kebijakannya. Tolak ukur organisasi yang efektif biasanya terlihat dari perencanaan yang dibuat oleh seorang pemimpin organisasi. Sebagaimana Robbins mendefinisikan efektif tidaknya organisasi terlihat dari tingkat pencapaian organisasi dalam jangka pendek dan jangka panjang.

Efektivitas merupakan hal yang penting dalam mengukur kinerja organisasi yang digerakkan oleh seorang pemimpin. Secara umum efektivitas merupakan cara untuk melihat seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Pernyataan ini sesuai dengan pengertian efektivitas menurut Hadayaningrat (1995:16) yaitu efektivitas merupakan pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun ukuran yang dinyatakan oleh Handayaningrat adalah seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya.

Hal terpenting dalam efektivitas adalah pencapaian tujuan yang sesuai dengan apa yang telah disepakati secara maksimal, tujuan merupakan cita-cita yang ingin dicapai dengan serangkaian proses. Analisis Petter dan Waterman menjelaskan bahwa organisasi yang memiliki karakteristik efektif adalah (1) mempunyai bias terhadap setiap tindakan dan penyelesaian pekerjaan yang dilakukan, (2) selalu dekat dengan para pelanggan agar dapat mengerti secara penuh apa yang dibutuhkan oleh para pelanggan, (3) memberikan tingkat otonomi yang tinggi pada para pegawai serta memupuk semangat kewirausahaan pegawai tersebut, (4) berusaha untuk meningkatkan produktivitas lewat partisipasi para pegawai perusahaan.

Jadi efektivitas dari beberapa pendapat dapat dipahami sebagai efektivitas dalam proses suatu program yang tidak dapat mengabaikan target sasaran yang telah ditetapkan agar operasionalisasi untuk mencapai keberhasilan dari program yang dilaksanakan dapat tercapai dengan tetap memperhatikan kualitas yang diinginkan oleh program, maka diperoleh hasil kerangka pemikiran sebagai berikut ini:

**Gambar.1**  
**Kerangka Pemikiran**



### **Analisis Pengaruh Kepemimpinan dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektivitas Program K3**

Dari pengujian statistik di atas, baik Analisis koefisien regresi linier berganda, analisis koefisien korelasi linier berganda, uji T dan uji F dapat diambil kesimpulan bahwa Pengaruh kepemimpinan berdasarkan koefisien regresi dari

variabel  $X_1$  ( $b_1$ ) adalah sebesar 0,506 atau bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa  $X_1$  berpengaruh positif terhadap  $Y$ .

Sedangkan analisis koefisien regresi dari variabel  $X_2$  ( $b_2$ ) adalah sebesar 0,502 atau bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa  $X_2$  berpengaruh positif terhadap  $Y$ . Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,318. Arti dari koefisien ini adalah bahwa sumbangan relatif yang diberikan oleh kombinasi variabel  $X_1$  dan  $X_2$  terhadap  $Y$  adalah sebesar 31,8% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain.

Berdasarkan pengujian statistik ini menunjukkan bahwa, meskipun memiliki korelasi, dan kerapatan hubungan antara variabel independent ( $X_1, X_2$ ) dengan variabel dependen ( $Y$ ), namun pengaruhnya masih kecil. Pengaruh  $X_1$  terhadap  $Y$  sebesar 0,469 termasuk dalam kategori interval sedang. Sedangkan  $X_2$  terhadap  $Y$  dengan tingkat pengaruh sebesar 0,463 masuk dalam tingkat interval sedang. Sedangkan antara  $X_1$  dan  $X_2$  secara bersama-sama terhadap  $Y$  pun persentasenya sebesar 31,8% atau kurang dari 50%, atau masuk dalam kategori rendah atau lemah. Sehingga secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa faktor lain lebih besar mempengaruhi Efektivitas pelaksanaan program K3 yakni sebesar 68,2% untuk mempengaruhi  $Y$ .

Dengan demikian, peran kepemimpinan belum terlalu dominan secara langsung untuk mempengaruhi masyarakat dalam menjalankan program K3. Dalam pelaksanaan di lapangan, sebagian besar masyarakat mengetahui K3, namun sebatas mengetahui, namun belum pada taraf memahami bahwa K3 merupakan budaya hidup yang harus dilestarikan. Kesadaran masyarakat tentang K3 masih bersifat lingkungannya disekitar rumahnya saja, untuk kebersihan

lingkungan diluar pekarangan rumahnya seperti jalan raya, gorong-gorong, dan kali, sebagian dari mereka masih menganggap bukanlah tanggung jawab mereka. Akan tetapi tanggungjawab pemerintah. Kegiatan gotong royong yang dilakukan masyarakat selama ini sebagian besar hanya membersihkan rumah mereka sendiri-sendiri. Dari hasil kuesioner yang peneliti edarkan kepada masyarakat Kelurahan Duren Jaya ada salah satu responden yang mengatakan bahwa;

“Kegiatan K3 ada sieh, Ketua RT menghimbau warga untuk membersihkan selokan rumahnya sendiri-sendiri, biasanya sieh mau deket-deket musim hujan”. (Warga RT 09,PNS,36Th).

Salah satu tokoh masyarakat, ketua majelis taklim ibu-ibu Perumahan Duren Jaya, yang peneliti wawancarai mengatakan:

“Pelaksanaan K3 dilingkungan Duren Jaya masih jauh dari harapan. Dorongan dari pemimpin setempat (RT/RW/Kelurahan) ada, tetapi kekuatan untuk merealisasikannya kurang, begitu juga dengan sarana dan prasarananya juga tidak mendukung. Jika ada pelanggaran di masyarakat, belum ada sangsi sehingga tidak menimbulkan efek jera kepada masyarakat”.

Berdasarkan pernyataan salah satu warga dan ketua masjelis taklim ibu-ibu di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian masyarakat belum memahami K3 secara utuh, karena tidak adanya sosialisasi tentang K3 itu sendiri. Sehingga, masyarakat hanya mengetahui kerja bakti yang dihimbau oleh ketua RT/RW

daerah tempat tinggal mereka masing-masing. Itupun pelaksanaannya tidak rutin, biasanya menjelang musim hujan tiba, kegiatan gotongroyong baru digalakkan untuk membersihkan selokan rumah masing-masing.

Masyarakat juga mengeluhkan iuran RT/RW untuk kebersihan yang dipungut langsung setiap bulannya, namun mereka tidak merasakan manfaat perubahan dari peningkatan kebersihan dan ketertiban di lingkungan sekitarnya, Kecuali daerah sekitar rumahnya sendiri. Hasil pengamatan Peneliti juga menemukan,kebersihan sungai, atau kali, dan jalan-jalan umum, dibiarkan begitu saja. Bahkan pinggiran jalan raya, dan sungai tersebut dijadikan tempat pembuangan sampah, dan sebagian penumpukan barang-barang jualan pedagang asongan seperti pedagang es kelapa,pedagang meubel, pedagang bensin eceran yang tidak tertata dengan rapi.

Meskipun ada peraturan pemerintah no. 10 tahun 2011, yang dikeluarkan oleh pemerintah kota Bekasi untuk direalisasikan ditingkat kelurahan, sampai pada sekup RT yang mengatur mengenai pembuangan sampah rumah tangga, limbah industri rumah tangga, pemilahan sampah, penertiban lingkungan, menjaga keindahan lingkungan. Hal ini juga menjadi alasan, bahwa masyarakat tidak sepenuhnya mengerti, ternyata K3 itu berkaitan dengan berbagai hal, dan tidak sesederhana pemahaman masyarakat selama ini.

Oleh sebab itu diperlukan keterampilan, kecerdasan, dan kreatifitas seorang pemimpin dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mencapai efektivitas program K3, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh seorang pemimpin, sebagai mana dijelaskan oleh S. P. Siagian (1978:77) bahwa

keberhasilan program diukur dari beberapa faktor seperti : kejelasan tujuan yang hendak dicapai, kejelasan strategi pencapaian tujuan, proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, perencanaan yang matang, penyusunan program yang tepat, tersedianya sarana dan prasarana kerja, pelaksanaan yang efektif dan efisien serta pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.

Jadi sematang apapun program yang dibuat oleh pemerintah, jika tidak diawasi, maka program tersebut tidak akan berjalan dengan efektif, keberhasilan program memerlukan pengawasan, begitu juga halnya dengan pelaksanaan K3 ini di kelurahan Duren Jaya. Aturan yang dibuat tidak sekedar tumpukan buku yang disimpan rapi, akan tetapi diperlukan aplikasi dari isi aturan tersebut. Kelemahan kontrol yang terjadi di Kelurahan Duren Jaya, karena mempercayakan begitu saja kegiatan kemasyarakatan seperti K3 ini, sehingga setiap ketua RT/RW tidak memiliki kendali, ketika mereka mengalami penyimpangan program.

Meskipun seorang lurah sudah memiliki perpanjangan tangan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat seperti pengurus RT/RW, namun pemantauan langsung dari Lurah ke lapangan juga sangat diperlukan, agar masyarakat dapat mengenal lagi pemimpinnya dengan baik.

## **PENUTUP**

**Kesimpulan:** berdasarkan hasil pengujian hipotesis, maka kesimpulan penelitian ini adalah : (1) Kepemimpinan Lurah berpengaruh positif terhadap efektivitas Pelaksanaan Program K3. (2) Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif terhadap



Efektivitas Pelaksanaan Program K3. (3) Arti dari koefisien ini adalah bahwa sumbangan relatif yang diberikan oleh kombinasi variabel  $X_1$  dan  $X_2$  terhadap  $Y$  adalah sebesar 31,8% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Sedangkan kesimpulan dari uji korelasi antara masing-masing variabel adalah (a) Terdapat keeratan hubungan antara variabel  $X_1$  dengan  $Y$  diperoleh hasil 0,469 atau dengan persentasenya sebesar 46,9 % dengan tingkat signifikansi 0,000. (b) Terdapat keeratan hubungan antara variabel  $X_2$  dengan  $Y$  berdasarkan hasil olahan statistik SPSS versi 17 adalah sebesar 0,463 atau sebanyak 46,3 %. (c) Hubungan antara variabel  $X_1$  dengan  $X_2$  sendiri diperoleh hasil keeratan hubungan kedua variabel tersebut 0,366 atau sebesar 36,6 %.

Taraf keeratan hubungan pada masing-masing variabel jika diukur dengan interpretasi koefisien korelasi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa antara variabel  $X_1$  (Kepemimpinan Lurah) dengan variabel  $Y$  memiliki keeratan hubungan yang sedang yakni, sebanyak 46,9%, sementara variabel  $X_2$  (partisipasi masyarakat) dengan  $Y$  (Efektivitas Pelaksanaan Program) sebesar 46,3%. Kemudian antara variabel  $X_1$  dan  $X_2$  memiliki keeratan hubungan yang lemah atau rendah sebesar 36,6%. Dengan demikian Efektivitas Pelaksanaan Program K3 di Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi belum bisa dikatakan berjalan secara efektif, jika pengaruh antara kepemimpinan dan partisipasi masyarakatnya rendah. Hal ini terlihat dari kecilnya presentase pengaruh yang diberikan secara bersama-sama untuk Efektivitas pelaksanaan Program K3 ini yakni sebesar 31,8 %. Meskipun kesadaran lingkungan sebagian masyarakat sudah ada, namun perlu didukung juga dengan kesadaran

menegakkan aturan K3 ini. Kemudian dorongan dari Lurah kepada masyarakat perlu diperkuat untuk menambah tingkat partisipasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bersih, tertib dan indah, karena lingkungan yang baik tentu akan berdampak kepada kesejahteraan hidup masyarakat.

**Saran.** Berdasarkan kesimpulan di atas dan berbagai temuan untuk menciptakan Efektivitas Pelaksanaan Program K3 di Kelurahan Duren Jaya Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh seorang Pemimpin, khususnya Lurah dalam menumbuhkan dan meningkatkan Partisipasi Masyarakat sebagai berikut: (1) Dalam membuat kebijakan yang berkenaan dengan Program K3, Rakyat harus dilibatkan sebagai fokus sentral dan objek pelaksana kebijakan tersebut. Sehingga masyarakat dapat memberikan masukan-masukan nyata bagi pemimpin untuk membuat Program K3 yang menjadi tujuan bersama masyarakat dan pemimpin. (2) Diperlukan kemampuan seorang pemimpin dalam melakukan pendekatan-pendekatan secara holistik kepada masyarakat agar partisipasi masyarakat meningkat demi tercapainya Efektivitas pelaksanaan program K3 ini. Hal ini dapat dilakukan dengan cara sosialisasi secara intens dalam pelaksanaan program K3 di masyarakat, dan melakukan pemantauan (kontrol) secara langsung kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan K3 ini. Dari kontrol ini seorang pemimpin dapat melihat secara langsung apa yang telah terlaksana dan apa perlu diperbaiki sebagai bahan evaluasi program. (3) Memberikan Penghargaan dan Hukuman. Penghargaan dapat diberikan oleh pemimpin kepada masyarakat bisa dengan cara menambah fasilitas-fasilitas pendukung program K3 seperti pengadaan tempat sampah, pemberian pohon-pohon penghijauan, mempromosikan RW/RT terbaik

dalam K3 sebagai objek percontohan, dan truk-truk pengangkut sampah. Sedangkan hukuman bagi masyarakat yang melanggar aturan K3 dapat didenda berupa uang atau penundaan pemberian fasilitas kebersihan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arsnetein, Sherry R. 1969. *A Ladder of Citizen Participation*. <http://www.lithgow-schmidt.dk/sherry-arnstein-ladder-of-citizen-participation.pdf>. [diakses pada tanggal 14 mei 2014]
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Penerbit Alfabeta, Bandung,
- Arikunto, Suharsimi, 2010. *Prosedur Penelitian*, Penerbit PT Rineka Cipta, Jakarta,
- Bintoro Tjokromidjojo, 1981. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta; Gunung Agung.
- Abe, Alexander, 2002. *Perencanaan Daerah Partisipatif*, Penerbit Pondok Edukasi: Solo.
- Adjid. Dudung A. 1985. *Pola Partisipasi Masyarakat Pedesaan dalam Pembangunan Pertanian Berencana, Khusus Usaha Tani, Berkelompok di jabar*, Bandung; Disertasi, Unpad.
- Bernada, Edoway, 2009. *Kepemimpinan Lurah dalam Mewujudkan Efektivitas Pelayanan public dan Kelurahan Kaliboro*, Distric Nabire, Kab. Nabire, Prov. Papua, IPDN.
- Burhanudin, Salam 1997. *Etika Sosial, asas moral, dalam kehidupan manusia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Covey, S.R. 1997, *The Seven Habits Of Highly Effective People*, diterjemahkan oleh Budijanto. Bina Rupa Aksara, Jakarta.
- Fakih, Mansour, 2000. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Gilley, J.W., Boughton, N.W., & Maycunich, A. (1999). *The Performance Challenge: Developing Management System to Make Employees Your Organization's Greatest Asset*. Cambridge, Massachusetts: Perseus Books
- Gibson L. James dkk. 2012. *Organisasi Perilaku. Struktur. Proses*. Jakarta; Penerbit Erlangga.
- Hamdi, Muchlis. 2010. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rajawali Press.

- Hasibuan, H. 2003. *Organisasi dan Motivasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Handoko.(2001). *Efektivitas Organisasi*.Jakarta: Erlangga
- Handoko, T.Sani,1995, *Manajemen*, Yogyakarta,BPFE
- Ivancevich, Konopaske, Matteson, 2011. *Organizational Behaviour and Management*,9<sup>th</sup> New York: McGraw Hill.
- Kurniawan, Agung. (2005). *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: PEMBARUAN.
- Kreitner, Robert dan Angelo, Kinicki,2003. *Perilaku Organisasi*, Penerjemah Erly Suandy, Jakarta,Salemba Empat.
- Koentjaraningrat,1996, *Partisipasi masyarakat Dalam Pembangunan Desa*.
- Kuczmarski, Robert J and Katherine M Flegal. 2000. *Criteria for Definition of Overweighth in Transition* :Background and Recommendations for the United States. *Am J ClinNutr*;72: 1074-1081.
- Ndraha, Taliziduhu, 1983. *Metodologi Pemerintahan Indonesia*,Bina Aksara, Jakarta,
- (-----),2003. *Kybernologi (ilmu Pemerintahan Baru)*1,PT Rineka Cipta, Jakarta
- Nugroho, Riant, 2008.*Gender dan Strategi Pengarusutamaannya di Indonesia*, Pustaka Pelajar,Yogyakarta,2008.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 1998. *Pengembangan Sumber Daya Manusia, Edisi Kedelapan*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Oakley, Aan, 1985. *Sex, Gender and Society*, London: Temple Smith.
- Osborne, David, 1996, *Mewirausahakan Birokrasi* (Terj. Abdul Rosyid), Jakarta, Ikrar Mandiri Abadi.
- Rasyid, Muhammad Ryass, 2007. *Makna Pemerintahan, Tinjauan dari segi Etika dan Kepemimpinan*,Jakarta, PT Mutiara Sumber Widya.
- Rivai,Veithzal, 2004.*Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, Rajawali Press, Jakarta.
- Siagian P., Sondang, 2012. *Teori Pengembangan Organisasi*,PT Bumi Aksara,Jakarta,

- Sukesi, Keppi, 2002. *Hubungan Kerja dan Dinamika Hubungan Gender dalam Sistem Pengusahaan Tebu Rakyat*. Malang: Lembaga Penerbitan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya.
- Sudarmo, 2009. *Dramatisasi Asumsi Gaya Kepemimpinan Bagi Efektivitas Organisasi*, Penerbit Gaya Media, Yogyakarta.
- Syafie, Inu Kencana, 2011. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Subarsono, 2012. *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta, PT Pustaka Pelajar.
- Subakti, Ramlan, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta; PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2014, *SPSS untuk Penelitian*, Yogyakarta; Pustaka Baru Press.
- Sumaryadi, I Nyoman. 2005. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta : Citra Utama.
- Suradinata, Ermaya, 1996. *Manajemen Sumber Daya Manusia-Suatu Tinjauan Wawasan Masa Depan*, Bandung: Ramadan.
- (\_\_\_\_\_), 1992. *Administrasi Lingkungan dan Ekologi Pemerintahan Dalam Pembangunan*, Bandung: Ramadan.
- Sastropoetro, Santoso. 2000. *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi, dan Disiplin*
- Stoller, Roberth, 1968. *Sex and Gender: on the Development of Masculinity and Femininity*. London; Hogarth Press.
- Viser I, 2002, *Prototypes of gender : Conceptions of Feminine and Masculine*” *Womens Studies International Forum*, Vol 25, No. 5, 529-539.
- Wahjosumidjo. 2004. *Kepemimpinan dan Motivasi*. Jakarta; Ghalia Indonesia
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 cetakan 2013  
Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 10 Tahun 2011
- [www.jabarprov.go.id](http://www.jabarprov.go.id) diunduh pada tanggal 25 Februari 2014
- [www.menegpp.go.id](http://www.menegpp.go.id) diunduh pada tanggal 21 Februari 2014
- [www.kbbi.go.id](http://www.kbbi.go.id), diunduh pada tanggal; 5 mei 2014